



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARDI**
2. Jabatan : **PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA**
3. NHK : **214338**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **305.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/48 m² di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. Tanah Seluas 300 m² di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
3. Tanah Seluas 20000 m² di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 5000 m² di KAB / KOTA OKU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 5000 m² di KAB / KOTA OKU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **42.300.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000
4. MOTOR, HONDA VARI 150 CC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **68.615.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **50.884.688**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	466.799.688
III. HUTANG	Rp.	2.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	464.799.688

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.